MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indek Persepsi Anti Korupsi periode 1 Juli 2026 sampai 30 September 2026 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pendapat penggunan mengenai layanan Pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? (3.99)
2. Pendapat pengguna mengenai memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?(3.99)
3. Pendapat layanan pengguna mengenai melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? (3.99)

2. Tujuan Monitoring

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sei Rampah, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini berfungsi sebagai parameter utama evaluasi pencapaian kualitas pelayanan yang bersih dari praktik koruptif demi meraih predikat WBK dan WBBM

3. Pelaksanaan Monitoring

Sebagai landasan evaluasi, monitoring diawali dengan meninjau hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Maret 2026 s/d 30 Juni 2026. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area prioritas dalam pembangunan Zona Integritas serta memastikan tindak lanjut evaluasi berjalan secara objektif dan terukur

II. Uraian Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah, dapat dilaporkan perkembangan sebagai berikut:

1. Pencegahan komunikasi / Bantuan Tidak Resmi

   Kondisi lapangan saat ini :

   Penggunaan Saluran Komunikasi: Layanan PTSP sudah memiliki nomor resmi WhatsApp/Admin, namun belum berjalan sepenuhnya satu pintu. Beberapa

pemohon masih berhubungan langsung dengan pegawai menggunakan nomor pribadi untuk menanyakan progres berkas.

Temuan :

Masih ditemukan komunikasi penanganan berkas di luar saluran resmi PTSP antara oknum pegawai dan masyarakat. Nomor WhatsApp/Admin resmi PTSP kurang dipromosikan secara masif di media sosial maupun area tunggu pelayanan.

2. Penegakan Tolak Gratifikasi

   Kondisi lapangan saat ini :

   Ketersediaan Media Pengaduan dan Pengawasan: Kanal pengaduan publik (seperti kotak saran, aplikasi SIWAS, atau nomor pengaduan) sudah tersedia melalui meja pengaduan.

   Temuan :

   Pengaduan masyarakat di area PTSP masih bergantung pada metode tatap muka di meja pengaduan fisik. Belum adanya integrasi kanal pengaduan berbasis digital (seperti QR Code pengaduan interaktif atau formulir digital atau whatsapp yang khusus) menyebabkan pemanfaatan meja pengaduan kurang optimal dan membatasi aksesibilitas publik.

3. Pencegahan KKN & Pengawasan Internal:

   Pembahasan dalam briefing harian atau mingguan masih lebih banyak berfokus pada penyelesaian tugas teknis administrasi ketimbang evaluasi hasil pengawasan KKN dan tindak lanjut masyarakat.

   Temuan :

   Briefing koordinasi bersama Hawasbid belum dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan titik rawan KKN dan menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk dari publik.

III. Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring di atas, dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan langkah perbaikan ke depan.

1. Pencegahan Komunikasi / Bantuan Tidak Resmi
   a. Akar Permasalahan :
      - Kurangnya visibilitas dan sosialisasi nomor WhatsApp resmi PTSP kepada pemohon layanan.
      - Budaya komunikasi langsung antara pegawai dan masyarakat yang masih dibiarkan tanpa pengawasan.

   b. Tindak Lanjut

      Pemasangan banner, stiker QR code, serta pamflet informasi nomor resmi PTSP di area ruang tunggu, meja pelayanan, dan media sosial.

2. Penegakan Tolak Gratifikasi
   a. Akar Permasalahan :
      - Ketergantungan pada metode pengaduan fisik yang dinilai kurang menjamin kerahasiaan (anonymity) identitas pelapor.
      - Belum tersedianya saluran pengaduan digital yang ringkas dan mudah

b. Tindak Lanjut
   Pembuatan dan penempatan QR Code Pengaduan Digital di lokasi strategis area PTSP yang terhubung langsung ke formulir WhatsApp Pengaduan khusus.

3. Pencegahan KKN & Pengawasan Internal
   a. Akar Permasalahan
      Briefing berkala masih berfokus pada pemenuhan target administratif harian tanpa agenda khusus evaluasi integritas.
   b. Tindak Lanjut
      Dokumentasi briefing pagi dengan hakim pengawas atas setiap masukan pengaduan masyarakat untuk dilaporkan status tindak lanjutnya dalam briefing.

IV. Penutup

Seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026 telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada tiga unsur indikator terendah. Data ini akan menjadi basis utama bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan mitigasi risiko korupsi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Sei Rampah, 8 Oktober 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

Maria Christine Natalia Barus,S.IP.,S.H.,M.H.

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Dalam Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

1. Pencegahan komunikasi / Bantuan Tidak Resmi
   Menyediakan dan mempublikasikan nomor layanan WhatsApp/Admin resmi PTSP, serta mewajibkan seluruh komunikasi pengurusan berkas perkara hanya dilakukan melalui saluran resmi admin tersebut (mencegah pegawai/karyawan menggunakan nomor pribadi).



2. Penegakan Tolak Gratifikasi
   Pembuatan dan penempatan QR Code Pengaduan Digital di lokasi strategis area PTSP yang terhubung langsung ke formulir WhatsApp Pengaduan khusus.



3. Pencegahan KKN & Pengawasan Internal
   Dokumentasi briefing pagi dengan hakim pengawas atas setiap masukan pengaduan masyarakat untuk dilaporkan status tindak lanjutnya dalam briefing.



